

SINOPSIS

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Sosial RI, juga melaksanakan serangkaian tugas pokok dibidang penelitian dan pengembangan, selain itu juga melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. *Good governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif), oleh karena itu disini peran pimpinan sangatlah penting dalam hal mengelola lembaga itu sendiri yang mana keterlibatannya sangatlah dibutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang dilakukan pimpinan yang ada di lembaga Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang nantinya dapat diketahui harapan dari sebuah pengelolaan itu sendiri sesuai dengan *Good governance*. Inilah basis dari tatanan masyarakat yang diidamkan. Salah satunya yang dilakukan oleh B2P3KS (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berpedoman pada 9 prinsip pokok *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dilakukan oleh B2P3KS. B2P3KS sendiri merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian yang agar nantinya hasil penelitian dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain.

Berkaitan dengan *Good governance* yang bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang dilakukan pimpinan B2P3KS dengan menggunakan prinsip pokok *good governance* tidaklah mudah dalam menjalankannya karena perlu yang namanya keterkaitan dan kerjasama dalam semua aspek dan semua lembaga-lembaga terkait maupun kelompok berkepentingan dalam meningkatkan mutu penelitian agar nantinya dapat digunakan dan bermanfaat sebagai referensi untuk pengambilan keputusan selanjutnya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Jadi tata kelola yang diharapkan adalah tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, disepakati, setara berdayaguna dan berhasil guna dan memiliki visi dan misi yang jelas serta taat kepada hukum.

Kata Kunci: Tata kelola yang mengacu pada 9 prinsip pokok *good governance*.